RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL

TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 28 Telp. (0343) 426604 - 420910 Fax. 425679
PASURUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 188/601 /423.031/2023

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN

TAHUN 2024

Menimbang : a. Bahwa Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang atau Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD sebagai pedoman perencanaan kegiatan pembangunan SKPD selama 1 (satu) tahun;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang sebagaimana pada huruf a diatas, mengamanatkan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, dan Walikota Pasuruan telah menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan untuk berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA kegiatan tahun berkenaan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Memerintahkan kepada Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan -
Pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PASURUAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

RUDIYANTO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DINAS SOSIAL

Jl. Balaikota No. 10 Telp/Fax (0343) 423628

PASURUAN - 67117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN
NOMOR: 050/ 1993 2/423.105/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN
TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD sebagai pedoman perencanaan kegiatan pembangunan SKPD selama 1 (satu) tahun;

b. bahwa diktum KEDUA Keputusan Walikota Pasuruan Nomor Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 mengamanatkan penetapan Renja SKPD melalui Keputusan Kepala SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial;
10 Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA kegiatan tahun berkenaan.

KETIGA : Memerintahkan kepada Sekretaris Dinas Sosial Kota Pasuruan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Agustus 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760919 199602 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN
NOMOR 050/1693.2 /423.105/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
6	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
7	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos,MM
Pembina Tingkat. I
NIP. 19760919 199602 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pasuruan ini dapat disusun. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pasuruan ini merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2024.

Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dan target-target yang rencananya akan dicapai guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan transparan.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pasuruan ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas selama setahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien.

Pasuruan, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE,S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760919 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah 1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah 1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 5
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022, Tahun 2023 s.d Triwulan I dan Capaian Renstra Dinas Sosial 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 26
2.3.1 Penanganan PPKS 26
2.3.2 Pemberdayaan PPKS 26
2.3.3. Kebencanaan 26
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 26
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL 48
3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional 48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial 51
3.2.1 Tujuan Perangkat Daerah 43
3.2.2 Sasaran Perangkat Daerah 43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL 54
BAB V PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan 8
Tabel 2.2 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan 8
Tabel 2.3 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan 11
Tabel 2.4 Realisasi Capaian Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2023..... 12
Tabel 2.5 Tabel T-C29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 20
Tabel 2.6 Tabel T-C30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25
Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023 28
Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 46
Tabel 3.1 Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2024 51
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 52
Tabel 4.1 Pemetaan Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 59
Tabel 4.2 Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan 3
Gambar 3.1 Tema Prioritas dan Kebijakan RKP Tahun 2024 41
Gambar 3.2 Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024..... 42

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja, mempertimbangkan sinergi antar sector, serta memperhatikan aas koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Dinas Sosial tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas Sosial juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja.

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86 tahun 2017 Renja PD disusun berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
c. Urusan Wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusunan Renja PD
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
   - Penyiapan Data dan Informasi

b) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c) Penyusunan Rancangan Renja PD
   - Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD.
   - Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalan forum PD/lintas PD.
   - Rancangan Renja PD disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai

bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

- Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

d) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD.

e) Penetapan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut :

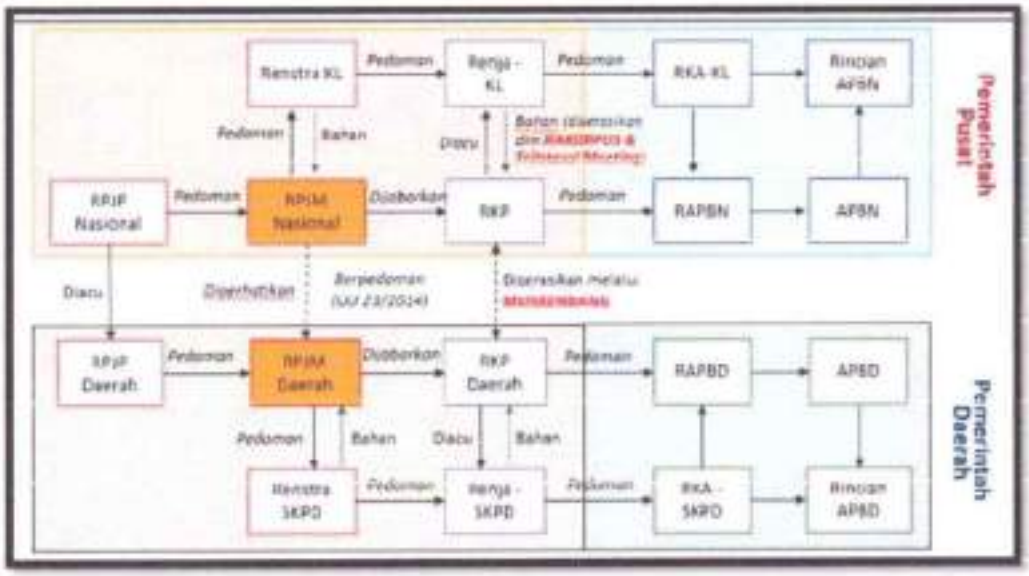

Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan

Dari bagan alur dapat dijelaskan Renja PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun, Renstra berpedoman pada RPJM Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang mengacu PRJP Nasional. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional yang berpedoman pada RPJP Nasional. Renja PD diserasikan dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi dengan urusan terkait.

Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pasuruan bersinergi dengan prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2024 yaitu "Sarana dan Prasarana Sosial Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrim". Dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, Dinas Sosial Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan Lembaga/Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 1016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang REncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;

8. Peeraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Darah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024

Maksud penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD Jangka Pendek 1 (satu) tahun;
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, Usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis PD;

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
3. Memelihara Konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur Kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;

5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Sosial sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Sosial

dan Capaian Renstra Dinas Sosial

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022, Tahun 2023 s.d Triwulan I dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana uraian-uraian berikut ini :

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Pada pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak mencapai target

Tabel 2.1

Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	35.979.927	22.857.349	63,53%
2.	Administrasi	Persentase	100	100	100	3.681.193.	3.548.089.	96,38%

	Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	%	%	000	971	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	42.482.830	36.514.630	85,95%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensin ya	100 %	100 %	100 %	75.074.220	43.770.356	58,30%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiny a layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	145.737.47 6	139.293.84 5	95,58%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	99 %	99%	223.832.35 0	189.435.93 7	84,63%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase terpenuhinny a pengadaan barang milik	80 %	80 %	100 %	309.018.71 5	265.336.28 4	85,86%

	Urusan Pemerintahan Daerah	daerah						
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Utama yang mendapatkan layanan sosial	80 %	53 %	67,5 %	184.469.990	95.310.850	51,67%
10.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	100 %	100 %	1%	1.399.894.548	1.129.298.640	80,67%
11.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	90 %	100 %	111 %	74.726.080	58.758.076	78,63%

	Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							
12.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	100 %	1%	27.982.480	20.215.254	72,24%

C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncakan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	90%	100%	111%	74.726.080	58.758.076	78,63 %

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2023 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas. Adapun realisasi capaian kegiatan sampai dengan Triwulan I Tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Realisasi Capaian Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi	623.752.527	17
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	18.828.150	28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	18.330.050	2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	498.100	1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	378.832.739	8
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	378.832.739	29
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	-	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	-	-
	Administrasi Barang Milik	Persentase Laporan	-	-

Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang OPD yang tersususn	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian yang tersusun	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	43.464.989	20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1.827.500	2
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-
	Penyediaan jenis barang cetakan	-	-
	Penyediaan jenis barang penggandaan	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	520.000	6
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.205.000	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	38.912.489	25
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	94.950.000	50
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	94.950.000	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa	55.667.349	22

	penunjang layanan perkantoran		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Penyedian Materai)	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	14.760.599	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	40.906.750	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	32.009.300	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30.946.000	3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.063.300	3
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	323.263.990	100
	Persentase PSKS yang aktif	-	85
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	323.263.990	100
	Persentase PSKS yang aktif	-	85
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	3.075.000	102

		Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	4
		Pendataan PSKS oleh	11.262.000	-6.494
		Rapat koordinasi, fasilitasi dan pembinaan TKSK	-	3
		Pembinaan Bansos Pangan bagi TKSK	-	1
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11.262.000	6.494
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	308.926.990	5
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	110.524.100	7
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	-	18
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3

	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	110.524.100	7
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	86.444.100	250
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	24.080.000	13
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di Update	48.395.000	3,92
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang di Update	-	-
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	45.320.000	1.613
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	3.075.000	100
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	21.496.830	2
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana mendapatkan layanan kebutuhan dasar	6.448.700	2
	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap	6.448.700	250

		Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus	-	-
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	-	-
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	15.048.130	100
	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15.048.130	61
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	4.650.000	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	4.650.000	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4.650.000	211

Faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Dukungan dan koordinasi telah berjalan cukup baik dengan berbagai pihak
2. Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten
3. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Sosial yang mencakupi
4. Adanya kerjasama dengan instansi lain
5. Adanya Validitas Data PMKS
6. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi lain
7. Kegiatan rutin dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak

Adapun faktor penyebab pencapaian target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Belum dipahami secara utuh terkait *outcome* yang akan dicapai sehingga masih ada kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
2. Kurang optimalnya koordinasi antar stakeholder terkait
3. Kurang maksimalnya data yang sesuai usulan dari Kelurahan karena tidak terdaftar pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
4. Belum maksimalnya sarana dan prasarana PKSAI guna pelayanan Rehabilitasi sosial terhadap anak

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain:

1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
2. Perlu dilakukan review renstra dinas sosial untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.

3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Triwulan I Tahun 2023 tercantum dalam tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.5 (T-C29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kota Pasuruan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan output	Target kinerja capaian program (renstra PD) tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan Tahun 2023	
			Target	Satuan		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) sampai tribulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib										

	Pelayanan Dasar										
1.06.	Bidang Urusan Sosial										
1.06.02.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100	%		100	100	1%	100	100	1
		Persentase PSKS yang	90	%		82	82	1	85	85	0,9
1.06.02.03	Pengembangan Potensi Sumbner Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat Kapasitasnya	90	%		82	82	1	85	85	0,9
1.06..02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/	408	orang		34	34	1	102	102	0,25

		Kota									
1.06..02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16	orang		4	4	1	4	4	0,25
1.06..02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Keluarga	25.976	Keluarga		7.470	7.470	1	6.494	6.494	0,25

	Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota :									
1.06..02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	Lembaga		5	5	1	5	5	0,25
1.06..04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9	%		9,2	9,2	1	9,2	7	0,77

1.06.04..2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lajut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	26	%		80	80	1	80	18	0,69
1.06.04..2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	450	orang		220	220	1	120	12	0,26
1.06.04..2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	85	orang		40	40	1	20	3	0,35

1.06.04..2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	46,2 %		100	100	1	35,62	7	0,15
1.06.04..2.02.01	Pemberian Layanan Deta dan Pengaduan	Jumlah Jenis PMKS yang terdata	190 orang		26	26	1	38	-	0
1.06.04..2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Belanja pelayanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	125 orang		11	11	1	25	-	0
1.06.04..2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak yatim yang terfasilitasi bantuan sosialnya, dan pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif	8.280 orang		1.301	1.303	1	1.657	250	0,030

1.06.04..2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	125	orang		40	40	1	25	13	0,104
1.06..05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang di update	2,9	%		2	2	1	1,85	3,92	1,35
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang di update	2,9	%		80	80	1	14,46	3,92	1,35
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	6.452	Keluarga		6.452	.6.452	1	6.452	1.613	0,25

1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.629	Keluarga		7.629	7.629	1	7.629	100	0.013
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase jumlah korban bencana yang tertangani	66	%		54.6	54,6	1	57	2	0,030
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar	66	%			-		54,6	2	0,030

1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000	jiwa		20.000	20.000	1	12.000	250	0,0125
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan sandang	20	orang		80	80	1	100	-	0
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang tersedia	4	unit		4	4	1	4	-	0

1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang ditangani	50	orang		50	50	1	50	-	0
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikolsosial	Jumlah tenaga yang melakukan penangana n psikososial	25	orang		25	25	1	21	-	0
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	90	%		100	100	1	100	100	1,1
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanak an Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana Kewenanga n Kabupaten/	61	orang		61	61	1	61	61	1

		Kota									
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2	%		1,81	1,81	1	1,9	100	50
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1,72	%		100	100	1	100	100	58,14
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	844	makam		211	211	1	211	211	0,25
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan	100 %	%		100	100	1%	100	17	0,17

	KABUPATEN/KOTA	keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang tersusun tepat waktu									
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	%		80	80	1	100	28	0,28
1.06.01.2.01.01	*Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	24	dok		6	6	1	6	2	0,083
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun*	8	lapor an		2	2	1	2	1	0,125

1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah even publikasi pembangunan yang diikuti*	4	- lapor an		2	2	1	1	-	0
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tapat waktu	100	%		100	100	1	100	8	1
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan*	29	Org/ bln		14	14	1	29	29	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah dokumen laporan yang tersusun*	24	lapor an		6	6	1	6	-	0
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun*	4	dok		1	1	1	1	-	0

1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milk Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tapat waktu	100	%		100	100	1	100	-	0
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	*Jumlah dokumen laporan barang OPD yang tersusun*	16	lapor an		4	4	1	4	-	0
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	100	%		100	100	1	100	-	0
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	*Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian yang tersusun*	16	dok		4	4	1	4	-	0
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah orang yang*	48	Pega wai		48	48	1	48	-	0

		mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	%		100	100	1	100	20	0,2
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	28	paket		7	7	1	7	2	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah tersedianya barang cetakan*	8	paket		5	5	1	2	-	0
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang*	96	dok		24	24	1	24	6	0,062

		tersedia									
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah makanan dan minuman yang tersedia*	20	laporan		5	5	1	5	1	0,05
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*	400	laporan		100	100	1	100	25	0,062
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang terpenuhi	100	%		80	80	1	80	50	0,5
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor*	32	unit		4	4	1	8	4	0,13
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantora	100	%		100	100	1	100	22	0,22

		n									
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	764	lapor an		191	191	1	191	-	0
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	48	lapor an		12	12	1	12	3	0,06
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	20	lapor an		6	6	1	5	2	0,1
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80	%		80	80	1	80	12	0,15
1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan	*Jumlah jasa pemeliharan kendaraan dinas/opera*	13	unit		13	13	1	13	3	0,23

	perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	*sional yang terpelihara*									
1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	*Jumlah izin kendaraan dinas yang terselesaikan*	13	unit		13	13	1	13	3	0,23
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dan berfungsi ulang*	11	unit		11	11	1	11	-	0,09
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Volume gedung kantor yang terpelihara*	1	unit		1	1	1	1	-	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan sesuai dengan tugas pokok da fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Pasuruan melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang sosial yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas yang diberikan kepada daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, telah ditetapkan indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yaitu:

1. Persentase Peningkatan PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya
2. Persentase PPKS yang teraksses layanan sosial dasar

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

TABEL 2.6 (T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL

KOTA PASURUAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKS	Target Renstra Perangkat Daerah (sesuai RPJMD 2016-2021)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Teraksesa Layanan Sosial Dasar			90	92	95	97	98.2	N.a	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pasuruan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Upaya Penanganan PPKS

   Pertumbuhan dengan angka kemiskinan di Kota Pasuruan yang masih tinggi berimplikasi pada berkembangnya PPKS serta Peningkatan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

2. Pemberdayaan PPKS

   Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Kota Pasuruan

3. Kebencanaan

   Terkait kebencanaan Dinas Sosial Kota Pasuruan telah menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Pasuruan periode tahun 2021-2026 yaitu:

Berdasarkan visi Kota Pasuruan tersebut maka tema Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2023 disesuaikan yaitu "Pasuruan Kota Madinah Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya" sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pasuruan tahun 2023, dengan prioritas pembangunan yang berhubungan dengan Dinas Sosial antara lain:

1. Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)
2. Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)

Tabel 2.7
Review terhadap RKPD tahun 2023
Dinas Sosial Kota Pasuruan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi*	*100%*	5,825,971,781	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi*	*100 %*	5.812.683.954	PROGRAM /KEGIATAN SESUAI PEMETAAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.

1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Penencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	36,783,427	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Penencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	67.919.580	
1.06.01 2.01.01	*Penyusunan dokumen Perencanaan*		Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	17,617,867	*Penyusunan dokumen Perencanaan*		Jumlah Dokumen Perencanaa	6 Dokum	24.845.120	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4,165,740	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Lapuran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Lapora n	6.730.540	

								SKPD			
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14,999,820	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	36.343.920	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	4,081,863,056	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	4.720.014.274	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang /bulan	4,012,638,800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ bulan	4.651.086.694	

1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	6 Laporan	67,458,276	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	6 Laporan	67.161.780
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1 Dokumen	1,765,980	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis		Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 Dokumen	1.765.800
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milk Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	70,684,830	Administrasi Barang Milk Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	55.552.920

1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	70,684,830	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	55.552.920	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat	100%	78,972,820	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur	100 %	3.478.980	
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	3,479,220	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	3,479,980	
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Pegawai	75,493,600	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Pegawai	0	
			Jumlah Publikasi yang ditayangkan	7 Tayang				Jumlah Publikasi yang	7 Tayang		

			Penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 Kali				ditayangkan Penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 Kali		
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	120,823,150	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	122.713.880	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	7,490,150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	7.486.600	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	5,836,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	5.836.480	

1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	3,520,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	3,520,800	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan	4,415,700	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan	4,415,000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	99,560,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	191 Laporan	101.455.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80%	896,742,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80 %	182.830.700	

1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	96,786,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	182.830.700
			Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	799,956,000			Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	223,832,350	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100 %	301.995.620
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	191 Laporan	1,130,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	191 Laporan	1,130,000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	76,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi	12 Laporan	56.884.770

1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	146,502,350	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	243.940.850
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80%	316,270,148	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80 %	358.218.000
1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13 Unit	141,004,794	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	13 Unit	183.210.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	13 Unit	8,500,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau	13 Unit	8,500,000
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	11 Unit	12,218,171	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin	11 Unit	12.060.000

1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	154,547,183	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	154.448.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100%	17,859,749,330	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100 %	13.858.488.800	
			Persentase PSKS yang aktif	85%				Persentase PSKS yang aktif	85 %		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	85%	17,859,749,330	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		Persentase PSKS yang meningkat kapasitasn	85 %	13.858.488.800	
1.06.0.2.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan		Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	102 Orang	294,031,630	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan		Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja	102 Orang	591.753.560	
1.06.0.2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kot		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang	4 Orang	17,788,900	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kot		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan	4 Orang	3.389.140	

1.06.0.2.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Keluarga Kewenangan		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan	6.494 Keluarga	15,822,787,500	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Keluarga Kewenangan		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasn	6.494 Keluarga	11.508.881.920	
1.06.0.2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	5 Lembaga	1,725,141,300	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	5 Lembaga	1.754.464.180	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pasuruan	*Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar*	*9,2%*	*2,542,926,770*	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pasuruan	*Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar*	*9,2%*	*2.444.950.180*	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitasi Terlantar, Anak Terlantar,		Persentase PPKS Utama yang mendapatkan layanan sosial	80%	563,472,400	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitasi Terlantar, Anak Terlantar,		Persentase PPKS Utama yang mendapatkan layanan	80%	471.994.500	

1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	461,551,900	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	423.807.100	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	101,920,500	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	48.187.400	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	35,62 %	1,979,454,370	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan	35,62 %	1.972.955.680	

1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	38 Orang	56,944,230	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan	38 Orang	35.873.560	
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	238,099,500	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	228.125.800	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	1657 Orang	1,554,410,620	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	1657 Orang	1,345.760.960	

1.06.04. .2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kcschatan dasar kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	130,000,020	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	363.195.340	
1.06..05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pasuruan	*Persentase DTKS yang di Update*	*1,85%*	*1,575,222,154*	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pasuruan	*Persentase DTKS yang di Update*	*1,85%*	*1.990.194.300*	
1.06..05 .2.02	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan*		Persentase DTKS yang menerima	14,46 %	1,575,222,154	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan*		Persentase DTKS yang menerima	14,46 %	1.990.194.300	
1.06..05 .2.02.02	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*		Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	6452 Keluarga	127,964,000	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*		Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	6452 Keluarga	620.540.300	

1.06..05 .2.03	*Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga*		Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	7629 Keluarga	1,447,258,154	*Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga*		Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	7629 Keluarga	1.369.654.000	
1.06..06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pasuruan	Persentase Korban Bencana yang	57%	*218,610,550*	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pasuruan	Persentase Korban Bencana	57 %	*221.231.460*	
1.06..06 .2.01	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*		Persentase Korban Bencana mendapatkan layanan kebutuhan dasar	100%	90,167,470	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*		Persentase Korban Bencana mendapatkan layanan kebutuhan dasar	100 %	90.056.080	
1.06..06 .2.01.01	*Penyediaan Makanan*		Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap	12000 Orang	50,245,200	*Penyediaan Makanan*		Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari	12000 Orang	50.238.500	

1.06..06 .2.01.02	*Penyediaan Sandang*		jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	5,500,000	*Penyediaan Sandang*		jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten /kota	100 Orang	5.483.400	
1.06..06 .2.01.03	*Penyediaan Tempat Penampungan*		Jumlah tempat pengungsian kewenangan	4 Unit	3,228,500	*Penyediaan Tempat Penampungan*		Jumlah tempat pengungsian	4 Unit	3.201.300	
1.06..06 .2.01.04	*Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan*		Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi	50 Orang	3,054,000	*Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan*		Jumlah orang yang mendapatkan penanganan	50 Orang	3.000.000	

1.06..06.2.01.05	*Pelayanan Dukungan Psikososial*		Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	21 Orang	28,139,770	*Pelayanan Dukungan Psikososial*		Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	21 Orang	28.132.880	
1.06..06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	100%	128,443,080	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	100 %	131.175.380	
1.06..06.2.02..02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	61 Orang	128,443,080	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	61 Orang	131.175.380	

								kewenangan kabupaten /kota			
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1,9%	*56,008,000*	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1,9 %	*56.007.260*	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	56,008,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	56.007.260	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	243 Makam	56,008,000	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /Kota	243 Makam	56.007.260	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui proses usulan lewat Pemangku Kepentingan bidang Sosial, adapun usulan dimaksud tercantum dalam tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024 Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Kota Pasuruan	Persentase PSKS yang aktif	50.000.000	Usulan Kemah Bhakti Karang Taruna Kota Pauruan
2	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Kota Pasuruan	Persentase PSKS yang aktif	50.000.000	Usulan Studi Tiru ke Kota Lain Karang Taruna Maju
3	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	34.000.000	Usulan Mamin Rapat Rutin Tahunan Karang Werda Kota Pasuruan

4	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	115.000.000	Usulan Rekreasi Karang Werda Kota Pasuruan
5	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial	68.000.000	Usulan Pelatihan Bercocok Tanam berkonsep " Kontak Alam " Disabilitas berkolaborasi dengan PA, Mitra Bakti, TKSK, PSM, dll

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas nasional hingga kabupaten/kota. Berikut tema prioritas dan kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
2. Peningjatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrasturktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibukota nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 dilaksanakan melalui proyek prioritas strategis (major project) :

1. Kawasan industri prioritas dan smelter;
2. Destinasi pariwisata prioritas;
3. Food estate (kawasan sentra produksi pangan);
4. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi;
5. Pengelolaan terpadu UMKM;
6. Wilayah adat Papua : wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay;
7. Pembangunan ibukota nusantara;
8. Reformasi sistem perlindungan sosial;

9. Reformasi sistem kesehatan nasional;
10. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0;
11. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting;
12. Jaringan pelabuhan utama terpadu;
13. Transformasi digital;
14. Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah)
15. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90 persen rumah tangga);
16. Pembangunan fasilitasi pengolahan limbah B3.



Gambar 3.1 Tema Prioritas dan Kebijakan RKP Tahun 2024

Dinas Sosial melaksanakan arah kebijakan RKP Tahun 2024 proyek prioritas strategis ke-8 yaitu "Reformasi Sistem Perlindungan Sosial". Hal ini dikarenakan proyek prioritas strategis tersebut merupakan tanggungjawab semua aspek pemerintahan dalam mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Tematik dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah "Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial" dengan arah kebijakan :

1. Penyediaan Pasar Penunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan;
2. Perluasan promosi dan pasar industri olahan yang siap eksport;
3. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian;
4. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi;
5. Menjaga kondusifitas sosial dan politik;
6. Digitalisasi pelayaan publik mendukung aktivitas masyarakat;
7. Keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
8. Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim.

Dinas Sosial melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan Ke-8 "Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim".



Gambar 3.2. Tematik dan Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024

Dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kota Pasuruan melakukan kerjasama dengan Lembaga/Perangkat Daerah dalam pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 3.1
Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dan
Arah Kebijakan Daerah Tahun 2024

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Dinas Sosial
Reformasi sistem perlindungan sosial	Sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

3.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas tujuan Dinas Sosial adalah "Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar"

3.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial adalah : "Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)"

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATORSASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)			1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penurunan penduduk miskin	0,39%	0.48 %	0.52 %	-	-	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	3,25 %	4,07%	4.9%	-	-
								Meningkatnya peran PSKS dalam meningkatkan usaha kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif	15.47 %	61.89 %	-	-	-

2		Persentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	-	-	-	5%	5%	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	-	-	-	50%	90%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksabaab suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang dianbil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapetkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya prorgam dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Sosial.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Berikut 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Penanganan Bencana

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capian kinerja suatu program atau kegiatan.

Dinas Sosial melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
   c. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota

10. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitasi Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial:
    a. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
    b. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
11. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial :
    a. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
    c. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
12. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :
    a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    b. Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga
13. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
14. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota :
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
    c. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
    d. Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
    e. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
15. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota :

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2023 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya tercantum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Tabel Pemetaan Sasaran Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kota Pasuruan

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/ Satuan	Kegiatan	IndikatorKegiatan	Target/ Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ Satuan	Pagu Sub Keg
1.	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terakses layanan social dasar	100 %	Pemberdayaan Sosial	Persentase bantuan social yang tersalurkan	100%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Persentase PSKS yang meningkat Kapasitasnya	85%	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja social masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	102 orang	294.031.630,-
					Persentase PSKS yang aktif	85 %				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan social Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	17.788.900
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	6.494 keluarga	16.613.926.875
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	1.811.398.365
				Rehabilitasi Sosial	Ptesentase PMKS	9,2%	Rehabilitasi	Persentase PPKS	80%	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang	120 org	461.551.900

					yang direhabilitasi sesuai tahun dasar		Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	Utama yang mendapatkan Layanan sosial			mendapatkan pelayanan rehabilitasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota		
										Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	20 org	101.920.500
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza Diluar Panti	Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	35,62%	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	38 org	56.944.230

						Sosial							
										Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten Kota	28 org	238.099.500
										Pemberian bimbingan fisik,mental, spiritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan social kewenangan Kabupaten/Kota	1657 org	1.554.410.620
										Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	25 org	130.000.020
				Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang di update	1,85%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah data DTKS yang menerima bantuan	14,46%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengelolaan fakir miskin Kabupaten/Kota	6452keluarga	127.964.000
										Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	7629 keluarga	1.447.258.154
				Penanganan Bencana	Persentase korban	57%	Perlindungan social	Persentase Korban Bencana	100%	Penyediaan makanan	Jumlah orang yang mendapatkan	12000 org	50.245.200

				bencana yang kertanga n		korban bencana alam dan sosial Kab/Kot a	mendapatk an layanan kebutuhan dasar			permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		
									Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	5.500.000
									Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota	4 unit	3.228.500
									Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	3.054.000
									Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	21 org	28.139.770
						Penyele nggaraa n Pember dayaan	Persentase Taruna Siaga Bencana Yang Aktif	100%	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan	61 org	128.443.080

							Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kaupaten/Kota		
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1,9%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	243 makam	56.008.000
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasitit asi	100%	Perencanaan, Pengangaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	22.022.367
					Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasitit asi	100%				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	4.270.740
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	5.124.820

						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org/bulan	4.112.954.800
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	6 Laporan	69.146.000
									Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.815.000
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	70.684.830
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 dokumen	3.479.220
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	48 Pegawai	75.493.600

								Jumlah publikasi yang ditayangkan	7 layang	
								Penguatan akuntabilitas kinerja PD	1 kali	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket	7.490.150
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	5.836.500
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	3.520.800
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	4.415.700
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	99.560.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	80%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	96.786.000
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang	1 unit	799.956.000

										disediakan		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	191 laporan	1.130.000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	76.200.000
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	146.502.350
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	141.004.794
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit	8.500.000
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	12.218.171
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan	1 unit	154.547.183

								dan Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/dicha bilitasi		

Tabel 4.2 (Tabel T-C.33)

Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kota Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1 6 1	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang terfasilitasi*		*100%*	*5.887.963.721*			*100%*	*5.375.820.905*
1 6 1 2:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penerncanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua	100%	31.417.927			100%	43.247.323

							Kelurahan							
1	6	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	22.022.367	APBD		6 Dokumen	23.123.485
1	6	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	4.270.740	APBD		2 Laporan	4,374,027
1	6	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	5.124.820	APBD		1 Laporan	15,749,811
1	6	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan Semua Kecam	100%	4.183.915.800			100%	4.393.111.590

						atan Semua Kelurahan							
1	6	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang/bulan	4.112.954.800	APBD		29 Orang/bulan	4.318.602.540
1	6	1	2:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		6 Laporan	69.146.000	APBD		6 Laporan	72.603.300
1	6	1	2:02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1.815.000	APBD		1 Dokumen	1.905.750

1	6	1	2:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	72.453.000			100%	76.075.650
1	6	1	2:03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	72.453.000	APBD		4 Laporan	76.075.650
1	6	1	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	3.567.000			100%	3.745.300
1	6	1	2:05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	3.567.000	APBD		4 Dokumen	3.745.350

1	6	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	123.844.400				174,189,822
1	6	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		7 Paket	7.678.000	APBD		7 Paket	7,864,657
1	6	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2 Paket	5.982.500	APBD		2 Paket	6,128,325
1	6	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		24 Dokumen	3.608.800	APBD		24 Dokumen	3,696,840
1	6	1	2:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		5 Laporan	4.526.100	APBD		5 Laporan	6,500,000
1	6	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi		100 Laporan	102.049.000	APBD		100 Laporan	150,000,000

					SKPD	dan konsultasi SKPD								
1	6	1	2: 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	80%	919.160.900			80%	104.166.300
1	6	1	2: 07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		8 Unit	99.206.000	APBD		8 Unit	104.166.300
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	819.954.900			-	0
1	6	1	2: 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	229.428.600			100%	240.900.030

1	6	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		191 Laporan	1.158.250	APBD		191 Laporan	1.216.160
1	6	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	78.105.000	APBD		12 Laporan	82.010.250
1	6	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		5 Laporan	150.165.350	APBD		5 Laporan	157.673.620
1	6	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	80%	324.176.094			80%	340.384.890
1	6	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		13 Unit	144.529.894	APBD		13 Unit	151.756.380

1	6	1	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		13 Unit	8.712.500	APBD		13 Unit	9.148.125
1	6	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		11 Unit	12.523.700	APBD		11 Unit	13.149.885
1	6	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	158.410.000	APBD		1 Unit	166.330.500
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan		100%	18.507.650.030			100%	19.433.032.530
						Persentase PSKS yang aktif		85%				87%	
1	6	2	2:03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelura	85%	18.507.650.030			87%	19.433.032.530

							han						
1	6	2	2:03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota		102 Orang	301.382.430	APBD		102 Orang	316.451.550
1	6	2	2:03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		4 Orang	18.233.600	APBD		4 Orang	19 145.280
1	6	2	2:03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		6.494 Keluarga	16.218.357.200	APBD		6.494 Keluarga	17.029.275.060
1	6	2	2:03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat		5 Lembaga	1.969.676.800	APBD		5 Lembaga	2.068.160.640

					Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota								
1	6	4			*PROGRAM REHABILITASI SOSIAL*	*Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar*		*9,2%*	*2.565.082.597*			*9,2%*	*2.921.805.705*
1	6	4	2:01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Utama yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	80%	*619.819.640*			80%	879.279.620
1	6	4	2:01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota		120 orang	507.707.090	APBD		120 orang	761.561.445
1	6	4	2:01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan		20 orang	112.112.550	APBD		20 orang	117.718.175

						Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota							
1	6	4	2:02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapatkan layanan sosial	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35,62 %	1.945.262.957			35,62 %	2.042.526.085
1	6	4	2:02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota		38 Orang	62.638.653	APBD		38 Orang	65.770.585
1	6	4	2:02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota		25 Orang	261.909.450	APBD		25 Orang	275.004.925
1	6	4	2:02	7	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1657 Orang	1.477.714.832	APBD		1657 Orang	1.551.600.575

						kewenangan kabupaten/kota							
1	6	4	2:02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota		25 Orang	143.000.022	APBD		25 Orang	150.150.000
1	*6*	*5*			*PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL*	*Persentase DTKS yang di Update*		*1,85%*	*1.740.222.869*			*1,6%*	*1.827.234.000*
1	6	5	2:02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	14,46 %	1,740.222.869				1.827.234.000
1	6	5	2:02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota		6452 Keluarga	148.240.000	APBD		6452 Keluarga	155.652.000

1	6	5	2:02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota		7629 Keluarga	1.591.982.869	APBD		7629 Keluarga	1.671.582.000
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani		57%	*240.471.585*			60%	*249.295.190*
1	6	6	2:01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana mendapatkan layanan kebutuhan dasar	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	99.184.197			100%	100.943.440
1	6	6	2:01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota		12000 Orang	55.269.700	APBD		12000 Orang	58.033.185

1	6	6	2:01	2	Penyediaan Sandang	jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota		100 Orang	6.050.000	APBD	100 Orang	6.352.500
1	6	6	2:01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota		4 Unit	3.551.350	APBD	4 Unit	3.728.950
1	6	6	2:01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota		50 Orang	3.359.400	APBD	50 Orang	3.527.370
1	6	6	2:01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota		21 Orang	30.953.747	APBD	21 Orang	32.501.435

1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	141.287.388			100%	148.351.750
1	6	6	2.02	2	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota		61 Orang	141.287.388	APBD		61 Orang	148.351.750
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		1,9%	*61.608.800*			2%	*64.689.240*
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Kota Pasuruan Semua Kecamatan Semu	100%	61.608.800			100%	64.689.240

							a Kelurahan						
	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		243 Makam	61.608.800	APBD		243 Makam	64.689.240
TOTAL									29.002.999.602				29.813.656.570

BAB V
PENUTUP

Dinas sosial berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial memiliki fungsi berupa penyusunan perencanaan di bidang sosial memiliki wewenang untuk pembinaan, koordinasi, pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

Dinas sosial dalam pelaksanaannya tidak luput dari adanya hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenangnya yang biasanya beraumber dari sumberdaya manusia itu sendiri yang mana antara lain partisipasi dari masyarakat dan kualitas sumber daya pendidikan itu sendiri antara lain :

- Kurang adanya peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan dalam kaitannya untuk menjadikan mereka lebih produktif.

Dalam mengatasi permasalahan dan hambatan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat, memberdayakan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih berkualitas
2. Memantapkan kerja sama dan koordinasi antar penyelenggara kegiatan kesehjateraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat
3. Membina dan mengembangkan tenaga masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesehjateraan sosial.

Usaha meningkatkan kinerja Dinas Sosial akan terus dilakukan dengan berbagai langkah terpadu dan menyeluruh melalui evaluasi dan perencanaan yang pada akhirnya tertuju pada kepentingan perkembangan Kota Pasuruan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 telah disusun dan semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing bidang di Dinas Sosial dan dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, 7 Agustus 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760919 199602 1 003